

ANTARA BAHASA ETNIK DAN BAHASA NASIONAL: Analisis Tindak Tutur Dalam Lingkungan Pelayanan Publik Di Kabupaten Maros

Ratna

Prodi Sastra Indonesia, Universitas Khairun
Pos-el: ratnaunkhair@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mengungkapkan bahasa yang lebih dominan digunakan oleh pelayan publik dan faktor-faktor sosial penggunaan bahasa pada pelayanan publik di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, dokumentasi, catat lapangan, kuesioner, dan wawancara. Teknik analisis data digunakan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif, berdasarkan ranah pemerintahan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia lebih dominan digunakan pada pelayanan publik di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Selanjutnya, bahasa Makassar, bahasa campuran antara bahasa Indonesia ke bahasa etnik, dan penggunaan bahasa Bugis. Adapun faktor sosial yang berkaitan dengan penggunaan bahasa adalah usia, sedangkan faktor sosial jenis kelamin dan pendidikan tidak berhubungan. Meninjau fenomena ini maka diharapkan para ahli bahasa dan pemerintahan lebih memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia maupun bahasa etnik melalui penyuluhan di berbagai instansi pemerintahan terutama di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

Kata Kunci: Bahasa Etnik, Bahasa Nasional, Tindak Tutur, Pelayanan Publik

Abstract

This paper aims to reveal, the language that is more dominant used by public servants, and the social factors of language use in public services in Tanralili District, Maros Regency. Data collection techniques were carried out through observation, documentation, field notes, questionnaires, and interviews. Data analysis techniques are used descriptively qualitatively and quantitatively, based on the domain of government. The results of the study illustrate that the use of Indonesian language is more dominantly used in public services in Tanralili District, Maros Regency. Furthermore, the Makassar language, the language mixes between Indonesian into ethnic languages, and the use of Bugis language. The social factors related to language use are age, while gender social factors and education are not related. Reviewing this phenomenon, it is expected that linguists and government experts pay more attention to the use of Indonesian and ethnic languages through counseling in various government agencies, especially in Tanralili District, Maros Regency.

Keywords: Ethnic Language, National Language, Speech Act, Public Service

A. PENGANTAR

Bahasa sebagai alat komunikasi dan alat interaksi yang dimiliki oleh manusia dapat diteliti secara internal maupun secara eksternal. Penelitian bahasa secara internal adalah struktur yang ada dalam bahasa, seperti struktur fonologis, struktur

morfologis, dan struktur sintaksis, dengan menggunakan teori-teori dan prosedur-prosedur yang ada dalam disiplin linguistik. Sebaliknya, penelitian bahasa secara eksternal yaitu penelitian yang dilakukan pada faktor-faktor yang berada di luar bahasa, yang berkaitan dengan pemakaian bahasa oleh para penutur dalam kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan. Penelitian secara eksternal, menghasilkan rumusan-rumusan atau kaidah-kaidah yang berkenaan dengan kegunaan dan penggunaan bahasa untuk kegiatan manusia di dalam kehidupan masyarakat dan Penelitian eksternal tidak hanya menggunakan teori dan prosedur linguistik tetapi, dapat pula menggunakan teori dan prosedur lain yang berkaitan dengan penggunaan bahasa sehingga penelitian bahasa secara eksternal melibatkan dua disiplin ilmu atau lebih (Chaer & Agustina, 2004:1).

Pada masyarakat dwibahasa, ataupun multibahasa terdapat pola kedwibahasaan yang mampu menunjukkan kedudukan dan fungsi bahasa yang terdapat di dalam repertoar bahasa masyarakat tersebut. Kedwibahasaan atau kemultibahasaan tidak jarang memicu permasalahan dalam penggunaan bahasa oleh pelayanan publik yang disebabkan oleh sejumlah bahasa yang terdapat pada repertoar masyarakat, karena ada kesalah pahaman yang terjadi antara penutur dan petutur dalam memaknai sebuah ucapan. Munculnya permasalahan dalam bahasa biasa disebabkan oleh situasi dan tekanan suara penutur atau lawan tutur. Oleh karena itu, masyarakat pengguna bahasa harus memperhatikan bahasa yang digunakan dalam berinteraksi dan situasi pada saat bertutur. Menurut Fishman (1972) pemilihan penggunaan bahasa oleh penutur tidak terjadi secara acak, melainkan harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain siapa yang berbicara, siapa lawan bicara, topik apa yang sedang dibicarakan, dan dimana peristiwa tutur itu terjadi.

Penggunaan bahasa yang diutarakan oleh Fishman sesuai dengan Undang-Undang Kebahasaan Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara yang terdapat pada pasal 25—40 dan pasal 30—31 tentang penggunaan bahasa pada pelayanan administrasi publik yang berbunyi, bahasa Indonesia yang wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. Dan pada pasal 31, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011). Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa bahasa Indonesia bersifat fundamental, dengan kata lain bahwa bahasa Indonesia harus menjadi bahasa nomor satu di negeri sendiri. Bahasa Indonesia memiliki peranan paling penting karena selain menjadi alat

komunikasi utama dalam lingkup masyarakat, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa yang wajib digunakan dalam situasi formal seperti, pada instansi pemerintahan.

Memperhatikan betapa pentingnya peranan bahasa Indonesia yang wajib digunakan dalam pelayanan administrasi pemerintahan, yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kebahasaan Nomor 24 Tahun 2009, ternyata tidak demikian yang terjadi di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Pelayanan publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat menggunakan bahasa secara bergantian. Bahasa yang digunakan secara bergantian dan bercampur, kadang-kadang menggunakan bahasa Indonesia, kadang-kadang menggunakan bahasa Makassar, dan kadang-kadang menggunakan bahasa Bugis. Sehingga, antara bahasa Indonesia dan bahasa etnik terkesan saling mengganti hal ini mengundang keraguan dari tiga bahasa tersebut, mana yang lebih dominan digunakan pada instansi pemerintahan yang terdapat di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros.

Penggunaan bahasa secara bergantian yang dilakukan oleh aparat pemerintah berkaitan dengan faktor sosial, faktor sosial yang dimaksud diantaranya usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Selain faktor sosial, kelas sosial juga ikut berpengaruh terhadap penggunaan bahasa pada pelayanan publik. Instansi pemerintahan di Kecamatan Tanralili yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu kantor lurah, kantor desa, dan puskesmas.

Kemajemukan kebahasaan (bahasa Indonesia, Makassar, dan Bugis) di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, memperlihatkan adanya saling pengertian atau toleransi yang tinggi di dalam masyarakat. Dengan demikian, secara fungsional bahasa juga ikut berperan dalam meningkatkan efektifitas dan kualitas proses pelayanan publik, meningkatkan perekonomian, dan meningkatkan sikap solidaritas. Fenomena kemultibahasaan di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros menarik untuk diteliti lebih jauh guna memberi gambaran penggunaan bahasa, khususnya pada ranah pemerintahan (kantor lurah, desa, dan puskesmas). Penggambaran penggunaan bahasa diharapkan dapat menjadi wahana untuk lebih dapat memahami kehidupan masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dibendung lagi, dan jaringan komunikasi semakin luas dan canggih sehingga dapat memengaruhi penggunaan dan pemilihan bahasa khususnya pada instansi pemerintah.

Kemajemukan kebahasaan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, Mengenai penggunaan bahasa pada pelayanan publik dalam masyarakat bilingual/multibahasa sebagai solusi menjawab masalah sebagai berikut;

- a. bahasa apa yang lebih dominan digunakan pada instansi pemerintahan (kantor lurah, puskesmas, dan, kantor desa) dalam pelayanan publik?
- b. apakah faktor sosial (jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan) berkaitan dengan penggunaan bahasa pada pelayanan publik ?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Bahasa

Bahasa merupakan alat yang menjembatani setiap komunikasi dalam masyarakat. Bahasa yang lahir dari interaksi sosial dan struktur bahasa yang berlaku pada masyarakat tertentu, mencerminkan adanya pola interaksi sosial. Pola tersebut bertindak sebagai masukan (*input*) yang kemudian diolah oleh sistem kognitif yang dijalankan oleh perangkat biologis bahasa di otak manusia (Seidenberg dalam Mac Whinney, 1998:200) hal tersebut, secara empiris sulit ditunjukkan namun simulasi melalui komputer dapat menggantikan pemerolehan bahasa oleh otak manusia (Steel, 2000). Beberapa penelitian kemudian menyatakan bahwa bahasa dari individu muncul sebagai hasil perpaduan wujud fisik manusia yang bekerja mengolah sumber-sumber budaya yang berlaku di sekitar masyarakat dengan batasan-batasan tertentu (Elman, 1999), dan salah satu dari batasan tersebut adalah bersifat temporal (Kramsch, 2002).

2. Faktor-Faktor Sosial dalam Penggunaan Bahasa

Masyarakat bilingual/multilingual, dalam pemakaian bahasa untuk komunikasi selain dipengaruhi oleh faktor-faktor linguistik, dapat pula dipengaruhi oleh faktor-faktor nonlinguistik atau di luar bahasa. Faktor yang demikian sering pula dikatakan dengan faktor sosial. Pandangan demikian cukup beralasan karena pada dasarnya bahasa adalah bagian dari suatu sistem sosial. Sistem sosial erat hubungannya dengan sistem budaya, maka bahasa juga tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor budaya.

Dalam era mendatang studi bahasa bersama masyarakat tuturnya tetap memegang peranan sentral di dalam menggalang kerja sama yang harmonis guna mendukung kemajuan bidang-bidang kehidupan yang lain, seperti sosial politik, ekonomi, sains, dan teknologi (Wijaya dkk, 2006: 54). Holmes (dalam Amir, 2010) melalui kajian pemilihan bahasa secara sosiolinguistik menyatakan bahwa pemilihan bahasa ditentukan oleh pertimbangan linguistik baik faktor luar maupun faktor dalam. Diantara penentu linguistik terdapat kode yang tersedia terhadap komunitas bilingualisme dan tingkat kemahiran penutur terhadap bahasa-bahasa tersebut.

a. Jenis Kelamin dalam Penggunaan Bahasa

Hasil penelitian Chaika (dalam Mahmudah, 2005) menunjukkan adanya perbedaan penggunaan kosa kata bahasa Portugis antara laki-laki dan perempuan di Brazilia. Perbedaan itu terlihat pada kata kerja dan kata sifat. Kata leksikal yang sama dapat berkonotasi berbeda. seperti, kata 'Sabio' (lelaki bijaksana) tidak ada penyeimbangan untuk kata wanita bijaksana, wanita terbaik disebut 'Sabiconna' artinya seorang wanita yg ingin mengetahui banyak.

Sama dengan kata Sabiconna (dia ahli), dalam bahasa Inggris perempuan yang pintar tidak dikatakan "orang pintar" tetapi cenderung dikatakan 'orang sombong'. Berikutnya hasil penelitian Coates (dalam Mahmudah, 2005) terhadap kelompok diskusi laki-laki dan khusus perempuan memperlihatkan bahwa perempuan dalam berbicara lebih banyak menggunakan kehidupan pribadi, membahas satu topik dalam waktu yang cukup lama dan membiarkan semua menyelesaikan pembicaraannya sedangkan, laki-laki sebaliknya. Dengan kata lain ada perbedaan sikap dan perilaku bahasa antara laki-laki dan perempuan dalam berkomunikasi, artinya bahwa wanita selalu memiliki titik kelemahan dalam berkomunikasi, sebaliknya kaum laki-laki selalu memiliki kesempurnaan baik menggunakan bahasa baku maupun nonbaku, laki-laki selalu ada ruang baginya untuk beraktivitas sedangkan untuk perempuan ada batas-batas yang dilalui.

Berikutnya hasil penelitian Coates (dalam Mahmudah, 2005) terhadap kelompok diskusi laki-laki dan khusus perempuan memperlihatkan bahwa perempuan dalam berbicara lebih banyak menggunakan kehidupan pribadi, membahas satu topik dalam waktu yang cukup lama dan membiarkan semua menyelesaikan pembicaraannya sedangkan, laki-laki sebaliknya. Dengan kata lain ada perbedaan sikap dan perilaku bahasa antara laki-laki dan perempuan dalam berkomunikasi, artinya bahwa wanita selalu memiliki titik kelemahan dalam berkomunikasi, sebaliknya kaum laki-laki selalu memiliki kesempurnaan baik menggunakan bahasa baku maupun nonbaku, laki-laki selalu ada ruang baginya untuk beraktivitas sedangkan untuk perempuan ada batas-batas yang dilalui.

b. Usia/Umur dan Penggunaan Bahasa

Umur merupakan salah satu rintangan sosial yang membedakan kelompok-kelompok manusia. Kelompok manusia akan memungkinkan timbulnya dialek sosial yang sedikit banyak memberikan warna tersendiri pada kelompok tersebut. Usia akan mengelompokkan masyarakat menjadi kelompok anak-anak, kelompok remaja, kelompok dewasa. Tentu saja batas usia tidak bisa secara tepat dipastikan.

Penggunaan bahasa seseorang akan mengalami tahapan-tahapan, mulai usia anak-anak belajar berbicara kurang lebih 18 bulan, dan usia kurang lebih tiga setengah tahun anak boleh dikatakan sudah menguasai tata bahasa, bahasa ibunya, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan orang dewasa secara sempurna. Kata-kata yang tetap bertahan dalam tutur mereka, adalah kata-kata tergolong kontetif atau kata penuh, yaitu kata yang mempunyai makna sendiri jika berdiri sendiri. Proses komunikasi berlanjut dan berlangsung sampai anak menjelang usia masuk sekolah yaitu, ketika anak dianggap sudah pantas belajar sopan santun berbahasa, diajarkan menggunakan berbahasa halus terhadap orang-orang sekitarnya. Setelah menginjak remaja dan dewasa mereka sudah mampu menggunakan bahasa yang baik dan sopan (Sumarsono dan Pranata, 2002: 137).

Umur seseorang membedakan cara bertutur, atau cara penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga mau pun di luar dari lingkungan keluarga seperti, di kantor, pasar, dan instansi pemerintah yang lain.

c. Pendidikan dan Profesi dalam Penggunaan Bahasa

Pendidikan pada hakikatnya berlangsung dalam suatu proses, yaitu berupa proses transformasi nilai-nilai, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Orang yang berpendidikan akan berbeda cara penggunaan bahasa dengan orang yang tidak memiliki pendidikan. Dari segi penggunaan kata sapaan 'kamu' dalam bahasa Indonesia atau 'iko' (Bugis), 'ikau' (Makassar) berterima apabila digunakan terhadap teman atau lawan bicara sudah akrab atau sebaya, tetapi menjadi janggal dan kurang berterima apabila ditujukan kepada orang yang dihormati (orang tua, orang yang dihormati karena jabatan dan usia). fungsi pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam berkomunikasi dapat membedakan bahasa yang digunakan untuk teman atau lawan bicara yang seusia, dan orang tua atau orang yang dihormati karena jabatan dan usia (Taha, 2008).

Derasnya arus globalisasi di dalam kehidupan akan berdampak pula pada perkembangan dan pertumbuhan bahasa sebagai sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam era globalisasi, bangsa Indonesia mau tidak mau harus ikut berperan di dalam dunia persaingan bebas, baik di bidang politik, ekonomi, maupun komunikasi. Konsep-konsep dan istilah baru di dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara tidak langsung memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Dengan demikian, semua produk budaya akan tumbuh dan berkembang pula sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk bahasa Indonesia, sekaligus

berperan sebagai prasarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan iptek (Sunaryo, 1995).

3. Penggunaan Bahasa pada Pelayanan Publik

a. Definisi Pelayanan Publik

Pelayanan publik dalam arti yang sempit adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar.

Pelayanan merupakan tugas utama bagi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas tersebut secara jelas telah digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat yang berbunyi: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dara Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Moenir (dalam Adi dan Deksa, 2001:IX) mengatakan "Pelayanan umum dan hak dasar warga negara dan hak asasi saling berkaitan, dana alokasi khusus terpisahkan satu sama lain". Hal tersebut, sejalan dengan pernyataan Sarundajang (1999:16) bahwa "Pemerintah memiliki fungsi umum pemerintahan yaitu fungsi pengaturan (*Regulation*) dan fungsi pelayanan (*Service*)". Undang-undang Dasar nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 mengenai pokok-pokok kepegawaian, dan pada Bab II Pasal 3 (Ayat 1) ditegaskan bahwa: Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan (dalam Adi Deksa, 2011:2).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa pelayanan publik memberikan layanan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan baik berupa jasa maupun berupa barang. Instansi pemerintahan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros yaitu kantor lurah, kantor desa, dan puskesmas.

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan (sakit), kantor lurah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa surat-surat keterangan untuk pembuatan kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), dan sebagainya. Kantor desa memberikan surat keterangan ke kantor lurah untuk pengurusan surat kartu keluarga (KK), surat tanda penduduk (KTP), surat akte jual beli tanah, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

b. Peran dan Fungsi Pelayanan Publik

Instansi pemerintahan pada pelayanan publik di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros yaitu kantor lurah, kantor desa, dan puskesmas sebagai instansi yang berfungsi dan berperan penting untuk keperluan di lingkungan masyarakat. Salah satu contoh peran pelayanan publik yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat baik berupa barang maupun jasa. Peran dan fungsi kantor desa memberikan pelayanan kepada masyarakat misalnya, untuk mendapatkan surat pengantar pembuatan akte jual beli tanah, KTP, KK dan sebagainya. Fungsi bahasa pada pelayanan publik di kantor desa, memberikan penjelasan dan pengarahan syarat syarat untuk mengurus surat-surat akte jual beli tanah, KTP, KK. Selain itu, bahasa berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai surat-surat yang dibutuhkan oleh masyarakat selain itu, berfungsi sebagai alat komunikasi untuk memperlancar pelayan publik di kantor desa dan masyarakat.

Ada beberapa fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya yaitu:

- a. Fungsi pelayan masyarakat (*public service function*),
- b. Fungsi pembangunan (*development function*), dan
- b. Fungsi perlindungan (*protection function*).

Wajah birokrasi publik selama orde baru sebagai pelayan rakyat sangat jauh dari yang diharapkan (Alma, 2007).

c. Jenis-jenis Pelayanan Publik

Jenis-jenis pelayanan publik dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari, pelayanan publik tersebut terbagi atas dua yaitu:

- a. Pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik.
- b. Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Pada puskesmas pelayanan yang diberikan oleh pelayan yaitu berupa pelayanan jasa dan pelayanan barang. berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik.

Tujuan pelayanan publik adalah menyediakan barang dan jasa yang terbaik bagi masyarakat. Barang dan jasa yang terbaik adalah yang memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian pelayanan publik yang terbaik adalah yang memberikan kepuasan terhadap publik, kalau perlu melebihi harapan publik. Dalam arti yang luas, konsep pelayanan publik (*public service*) identik dengan publik administration yaitu berkorban atas nama orang lain dalam mencapai kepentingan publik. Dalam konteks tersebut pelayanan publik lebih dititik beratkan

kepada elemen-elemen administrasi publik seperti *policy making*, desain organisasi, dan proses manajemen yang dimanfaatkan untuk mensukseskan pemberian pelayanan publik, pemerintah merupakan pihak *provider* yang diberi tanggung jawab.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengkaji penggunaan bahasa pada masyarakat dwibahasa/multibahasa di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Penelitian tersebut termasuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data mengenai penggunaan bahasa pada masyarakat dipaparkan sebagai mana adanya, selanjutnya data dianalisis untuk dihubungkan dan dinilai berdasarkan ranah pemerintahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Dengan menggunakan pendekatan sosiolinguistik, dan model analisis yang dikembangkan oleh Fishman yaitu, dengan menggunakan konsep ranah. Pendekatan kualitatif, yaitu berawal pada data dan bermuara pada kesimpulan (Hymes, 1970).

2. Lokasi Penelitian

Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. Kecamatan Tanralili termasuk daerah yang sebagian besar berbetuk dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 500 M di atas permukaan laut. Luas Kecamatan Tanralili sekitar 84,46 Km², dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: (a) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tompobulu, (b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Simbang, (c) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bantimurung, (d) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandai. Lokasi ini berjarak 8 km dari ibu kota Kabupaten, dan jarak ke ibu kota propensi 30 km.

3. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan pada interaksi sosial dalam bentuk percakapan pada situasi pelayanan publik sebagai objek penelitian. Pelayanan publik pada penelitian ini dibatasi pada wilayah administratif Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, yang meliputi kantor lurah, puskesmas induk, puskesmas pembantu dan kantor desa. Data yang akan diperoleh dari interaksi sosial tersebut berasal dari tuturan (interaksi verbal) pegawai pelayan publik baik yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau tenaga honorer maupun dari masyarakat yang sedang menerima pelayanan.

4. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif, karena berusaha mengungkapkan kalimat-kalimat yang digunakan oleh pelayan publik kepada

masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian ini dirancang secara deskriptif analitis. Artinya, dalam penelitian yang dideskriptifkan tuturan pelayan publik dalam instansi pemerintahan dengan menggunakan pendekatan sociolinguistik.

5. Populasi dan Sampel

Tujuan penelitian ini mengungkapkan dominasi penggunaan bahasa pada pelayanan publik di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dan mengungkapkan faktor-faktor sosial yang berkaitan dengan penggunaan bahasa, sehingga diperlukan data kualitatif dan data kuantitatif.

Sehubungan dengan hal itu, populasi dalam penelitian ini adalah tuturan pelayanan publik pada instansi pemerintahan yang ada di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dan masyarakat yang memerlukan jasa pelayanan publik. Adapun sampel dalam penelitian ini diwakili oleh beberapa instansi pemerintahan yang ada di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros yaitu, Kantor Lurah Borong, Puskesmas Induk Tanralili, Puskesmas Pembantu Allaere, dan Kantor Desa Allaere.

Teknik penentuan sampel tersebut dilakukan secara purposif. Selanjutnya, teknik penarikan sampel didasarkan atas kelompok-kelompok sosial yang menjadi variabel untuk setiap instansi pemerintahan. Seperti jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Setiap variabel di tarik sebanyak 30 responden secara purposif. Sesuai dengan pendapat Arikunto (dalam Johar, 2010) bahwa tiga puluh subjek penelitian merupakan batas antara sampel kecil dan besar.

6. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi, seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Penelitian kuantitatif diperoleh melalui perhitungan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden.

7. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Metode Observasi
- b. Metode Dokumentasi
- c. Catat Lapangan
- d. Teknik Kuesioner (*questionnaire*)
- e. Teknik Wawancara

8. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang dikumpulkan dapat terjaga, melakukan kegiatan yakni ketekunan pengamatan dan triangulasi

9. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini difokuskan pada penggunaan bahasa pada pelayanan publik, penggunaan bahasa tersebut tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti umur, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Jenis data penelitian adalah data kualitatif dan data kuantitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penggunaan Bahasa Berdasarkan Jenis Kelamin

Data kualitatif pada percakapan 1,2,4,14,20 dan 27 pada situasi formal menggunakan bahasa Indonesia pada pembukaan percakapan kemudian mencampurkan bahasa Indonesia ke bahasa Makassar pada situasi yang sama. Kesimpulannya bahwa penggunaan bahasa tidak berkaitan dengan jenis kelamin.

Data kuantitatif pada ranah pemerintahan. Berdasarkan data penjelasan dan gambar diagram dapat disimpulkan bahwa dominasi penggunaan bahasa pada ranah pemerintahan kantor lurah sebagai pelayan publik berdasarkan jenis kelamin adalah jenis kelamin perempuan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia (BI) dibanding jenis kelamin laki-laki. Dominasi penggunaan bahasa Indonesia (BI) lebih banyak dibanding dengan bahasa daerah Makassar dan bahasa daerah Bugis, maupun campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Makassar.

2. Penggunaan Bahasa pada Pelayanan Publik di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Berdasarkan Usia.

Data kualitatif pada percakapan 3, 5, 6, 19, dan 28, Penggunaan bahasa pada pelayanan publik di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros secara bergantian dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah disebabkan oleh usia seseorang, atau menyesuaikan dengan mitra tuturnya agar pelayanan berjalan lancar dan efisien sesuai yang diinginkan bersama.

Data kuantitatif pada ranah pemerintahan. Berdasarkan data penjelasan dan gambar diagram dapat disimpulkan bahwa dominasi penggunaan bahasa pada kantor pemerintahan sebagai pelayan publik berdasarkan kategori usia didominasi oleh penggunaan bahasa Indonesia (BI). Responden yang berkategori dewasa apabilaberbicara dengan remaja lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia (BI) (71%), dibanding dengan usia kategori dewasa bila berbicara dengan usia dewasa yang

hanya (57%) dominasi penggunaan bahasa Indonesia (BI). Selanjutnya kategori usia tua yang menggunakan bahasa Indonesia (BI) hanya (14%).

3. Penggunaan Bahasa pada Pelayanan Publik di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Berdasarkan Pendidikan

Data kualitatif pada percakapan 2, 5, 18, dan 29 pada situasi formal menggunakan bahasa Indonesia pada pembukaan percakapan kemudian mencampurkan bahasa Indonesia ke bahasa Makassar pada situasi yang sama. Peralihan bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah tidak berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan tinggi ataupun pendidikan rendah menggunakan bahasa yang sama dalam administrasi pemerintahan, kadang-kadang menggunakan bahasa Indonesia dan kadang-kadang bahasa daerah.

Data kualitatif penggunaan bahasa pada ranah pemerintahan. Berdasarkan data penjelasan dan gambar diagram dapat disimpulkan bahwa dominasi penggunaan bahasa kantor pemerintahan sebagai pelayan publik berdasarkan kategori pendidikan didominasi oleh penggunaan bahasa Indonesia (BI). Responden yang berkategori pendidikan SMA lebih dominan menggunakan bahasa Indonesia (BI) dibanding dengan yang berpendidikan SMP dan PT.

4. Penggunaan Bahasa pada pelayanan Publik di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Berkaitan dengan Faktor Sosial

a. Penggunaan Bahasa Berdasarkan Jenis Kelamin

Penggunaan bahasa lebih dari satu atau dua pada pelayan publik dan masyarakat sama baiknya menurut Bloomfiel (1935:56) adalah bilingualism, begitu pula dengan pendapat Fishman bahwa penggunaan bahasa lebih dari satu baik atau tidak dapat dikatakan bilingualism. Penggunaan bahasa Indonesia ke bahasa Makassar pada situasi kerja di kantor lurah, puskesmas induk, puskesmas pembantu, dan kantor desa, Kecamatan Tanralili bertentangan dengan Undang-Undang kebahasaan nomor 24 tahun 2009. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dari kualitas pembicaraan artinya bahwa perempuan lebih banyak berbicara bila mengenai kehidupan pribadi dan menyangkut wilayah domestik tetapi tidak demikian dengan laki-laki, laki-laki lebih banyak diam bila berbicara mengenai kehidupan pribadi. Hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, di dapatkan bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan ataupun kaitan dalam penggunaan bahasa.

b. Penggunaan Bahasa pada pelayanan Publik di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Berdasarkan Usia.

Hasil penelitian melalui pengamatan dan wawancara, pada instansi pemerintahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, usia remaja dan dewasa lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dibanding dengan bahasa daerah (Makassar dan bahasa Bugis). Lain halnya dengan usia tua lebih banyak menggunakan bahasa daerah dibanding dengan bahasa Indonesia. Semakin bertambah usia seseorang semakin cenderung menggunakan bahasa daerah dan jarang sekali menggunakan bahasa Indonesia bahkan mereka menjadi dwibahasa/multibahasa yang menggunakan bahasa lebih dari satu secara bergantian dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah. Bahasa yang dipilih orang dewasa dalam berinteraksi disesuaikan dengan mitra tuturnya, umumnya orang dewasa dan orang tua menggunakan bahasa Indonesia pada situasi-situasi tertentu. Penggunaan bahasa Indonesia tidak berlangsung lama kemudian mengganti dengan bahasa daerah (bahasa Makassar atau bahasa Bugis). Pengamatan mendalam yang telah dilakukan, bahwa bahasa Indonesia yang digunakan dalam berinteraksi pada pelayanan publik di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, bukanlah bahasa Indonesia baku seperti yang digunakan pada situasi formal, melainkan bahasa Indonesia yang terinterferensi oleh unsur-unsur bahasa daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, hasil wawancara dan pengamatan penulis, diperoleh informasi bahwa mereka menggunakan bahasa Indonesia disesuaikan dengan mitra tuturnya. Penggunaan bahasa pada pelayanan publik di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros yang menggunakan bahasa secara bergantian disebabkan oleh usia seseorang, atau menyesuaikan dengan mitra tutur agar pelayanan berjalan lancar dan efisien sesuai yang diinginkan bersama. Penggunaan bahasa pada pelayanan publik yang berhubungan dengan umur seperti yang dikatakan oleh Fishman (1972) bahwa pemilihan penggunaan bahasa oleh penutur tidak terjadi secara acak, melainkan harus mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain siapa yang berbicara, siapa lawan bicara, topik apa yang sedang dibicarakan, dan dimana peristiwa tutur itu terjadi.

Acuan penggunaan bahasa adalah ranah (domain), yang merupakan konstelasi dari peserta interaksi, latar, dan topik. Ranah meliputi dua bagian yaitu ranah tinggi dan ranah rendah, biasa juga dikategorikan menjadi formal dan informal. Bahasa Indonesia lazim digunakan untuk ranah tinggi (formal) dan bahasa daerah lazim digunakan untuk ranah rendah (informal) seperti dirumah/keluarga.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, situasi seperti tersebut kini sudah berubah. Selain bahasa Indonesia yang digunakan pada ranah formal bahasa daerah juga digunakan pada ranah formal pada pelayanan publik di Kecamatan Tanralili

Kabupaten Maros. Tampaknya pelayan publik mulai mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh ketika menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada ranah pemerintahan.

c. c. Penggunaan Bahasa pada pelayanan Publik di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Berdasarkan Pendidikan

Hasil penelitian, melalui pengamatan dan wawancara yang kepada informan yang ada pada instansi pemerintahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, bahwa pada kategor pendidikan PT, lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dibanding dengan kategori SMA dan SMP. Dengan demikian, bahwa penggunaan bahasa tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan. Kategori S-1 menggunakan bahasa yang sama dengan kategori pendidikan SMA dan SMP, pada pelayanan publik di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.

Penggunaan bahasa pada pelayanan publik di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dengan pendidikan tidak berkaitan tetapi, menemukan adanya perbedaan kosa kata penggunaan bahasa Indonesia dari segi ragam bahasa yaitu ragam resmi/baku dan ragam santai/tidakbaku. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh yang berpendidikan tinggi banyak menggunakan bahasa Indonesia ragam resmi/baku dan yang berpendidikan rendah menggunakan bahasa Indonesia santai/tidakbaku, yang masih mengandung unsur-unsur bahasa daerah.

Fungsi pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam berkomunikasi dapat membedakan bahasa yang digunakan untuk teman atau lawan bicara yang seusia, dan orang tua atau orang yang dihormati karena jabatan dan usia (Taha, 2008). Orang yang berpendidikan jauh lebih baik penggunaan bahasanya dibanding dengan orang yang berpendidikan rendah. Temuan ini berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah (1995), ditemukan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari berhubungan dengan tingkat pendidikan dan jenis kelamin, sedangkan umur dan pekerjaan dan kepemilikan tidak berhubungan. Makin tinggi tingkat pendidikan makin besar kesempatan masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros tingkat pendidikan tidak berhubungan dengan penggunaan bahasa.

5. Dominasi Penggunaan Bahasa pada pelayanan Publik di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros

Berdasarkan hasil penelitian, informasi yang diperoleh melalui data kuesioner yang disebarakan kepada responden bahwa pada pelayanan publik dalam beraktivitas dan berkomunikasi pada ranah pemerintahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros,

menggunakan empat bahasa yaitu bahasa Indonesia, bahasa Makassar, bahasa Bugis, dan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Makassar, atau bahasa Indonesia dan bahasa Bugis. Penggunaan bahasa lebih dari satu atau dua pada pelayanan publik menurut teori Fishman bahwa masyarakat yang menggunakan lebih dari satu atau lebih dari dua disebut bilingual/multilingual.

Data mengenai bahasa secara umum yang dijelaskan sebelumnya pada deskripsi data di kantor lurah, puskesmas induk, puskesmas pembantu, dan kantor desa diperoleh hasil bahwa pelayanan publik pada instansi pemerintahan di Kecamatan Tanralili kabupaten Maros, menggunakan empat bahasa. Keempat bahasa yang digunakan pada pelayanan publik pada ranah pemerintahan di kantor lurah diperoleh 55% menggunakan bahasa Indonesia, 12% menggunakan bahasa Makassar, dan 33% yang menggunakan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Makassar. Ranah pemerintahan kantor lurah bahasa yang mendominasi kegiatan pelayanan terhadap masyarakat umum adalah bahasa Indonesia, disusul oleh bahasa campuran antara bahasa Makassar dan bahasa Indonesia.

Penggunaan bahasa pada pelayanan publik di puskesmas induk yaitu 62% menggunakan bahasa Indonesia, 25% menggunakan bahasa Bugis, dan 13% menggunakan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Makassar. penggunaan bahasa pada pelayanan publik di puskesmas pembantu yaitu bahasa Indonesia 67%, penggunaan bahasa Makassar 20%, dan penggunaan bahasa secara bergantian atau campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Makassar, atau bahasa Indonesia ke bahasa Bugis. Penggunaan bahasa Indonesia ke bahasa Bugis sebanyak 13%. Pada kantor desa penggunaan bahasa Indonesia 14%, bahasa Makassar 60%, dan bahasa Indonesia ke bahasa Makassar sebanyak 24%. Dari empat instansi pemerintahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten maros, bahasa yang banyak digunakan adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pada pelayanan publik, kemudian disusul dengan bahasa Makassar. Sedangkan wilayah kantor desa bahasa yang banyak digunakan adalah bahasa Makassar, disusul dengan bahasa Indonesia.

Berdasarkan data kuesioner yang dibagikan kepada responden pada instansi pemerintahan di Kecamatan Tanralili dapat dilihat dominasi penggunaan bahasa melalui tabel dan gambar diagram pada analisis data kusioner dapat disimpulkan bahwa dominasi penggunaan bahasa pada kantor pemerintahan sebagai pelayan publik adalah bahwa bahasa Indonesia (BI) lebih banyak penggunaannya dibanding dengan bahasa Makassar, bahasa Bugis, dan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Makassar.

Bahasa-bahasa yang ada di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros digunakan sebagai bahasa pengantar pada pelayanan publik, pelayan dan masyarakat menggunakan empat bahasa sebagai alat komunikasi untuk mempermudah pelaksanaan pelayanan publik, sekaligus menjalin keakraban antara pelayan publik dan masyarakat. Pegawai/ perawat dan dokter yang berasal dari luar daerah (Sinjai, Toraja, Bulukumba, Bone) yang tidak bisa menggunakan bahasa daerah dengan baik, tetapi dapat memahaminya sehingga, bahasa yang digunakan bergantian antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Pergantian dan percampuran bahasa yang digunakan terkadang tidak memahami sebuah kata dalam bahasa daerah atau bahasa Indonesia.

Masyarakat dwibahasa/multibahasa, hampir tidak mungkin seorang penutur menggunakan satu bahasa secara mutlak dan murni tanpa sedikit pun memanfaatkan bahasa atau unsur bahasa yang lain (Taha, 1985:79). Lebih lanjut pencampuran atau pembauran pemakaian dua bahasa atau unsur bahasa bukan sesuatu yang asing dalam pergaulan sehari-hari.

Sesuai dengan Undang-Undang kebahasaan nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang Negara, serta lagu kebangsaan. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 Pada pasal 30 yang mengatur tentang penggunaan bahasa pada administrasi pemerintahan diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Di samping, bahasa Indonesia bahasa daerah juga digunakan pada instansi pemerintahan sebagai bahasa pengantar pada aktifitas pelayanan publik untuk menjalin keakraban dalam berkomunikasi.

Temuan ini berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Amir (2010), ditemukannya bahwa bahasa Indonesia lebih dominan dipilih untuk digunakan dalam ranah keluarga. Perbedaan ini diakibatkan oleh perbedaan waktu penelitian dan lokasi penelitian. Sedangkan penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan bahasa paling dominan adalah bahasa Indonesia pada ranah pemerintahan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui angket/kusioner yang disebarkan mengenai bahasa yang digunakan oleh pelayan publik bila berhadapan dengan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan, begitu pula bila sedang mengadakan rapat, menghasilkan bahwa bahasa Indonesia lebih banyak digunakan pada pelayanan publik seperti yang telah dijelaskan dan digambarkan melalui grafik. Bahasa Indonesia lebih banyak digunakan pada instansi pemerintahan kantor lurah, puskesmas induk, dan puskesmas pembantu di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Selanjutnya disusul penggunaan bahasa daerah yaitu bahasa Makassar banyak digunakan pada kantor

desa kemudian, bahasa campuran dari bahasa Indonesia ke bahasa Makassar atau sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa Bugis.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab 1V bagian analisis data dan pembahasan, ada beberapa hal yang penting untuk disimpulkan seperti yang diuraikan berikut ini. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Pada instansi pemerintahan harus menggunakan bahasa Indonesia.

Tetapi kenyataannya tidak demikian yang terjadi di instansi pemerintahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros. Bahasa daerah Makassar dan Bugis masih dipergunakan pada instansi pemerintahan dalam situasi formal atau resmi namun demikian, bahasa Indonesia masih dominan penggunaannya pada instansi pemerintahan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.

Penggunaan bahasa pada pelayanan publik di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dengan faktor-faktor sosial, yaitu jenis kelamin, usia, dan pendidikan, tidak semuanya berkaitan dengan penggunaan bahasa. faktor sosial yang tidak berkaitan yaitu jenis kelamin dan pendidikan, sedangkan usia berkaitan dengan penggunaan bahasa pada wilayah pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma. 2007. *Pelayanan Publik di Era Reformasi* (online) (<http://bulletinalma.multiply.com>).
- Amir, J. 2010. "Pola Pemilihan Bahasa pada Ranah Keluarga di Kabupaten Pangkajene Kepulauan". *Disertasi*. Tidak diterbitkan. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Chaer, A dan Leonie Agustina. 1995. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Deksa, A. 2011. "Analisis Pelaksanaan Pelayanan Umum Di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros". *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Fishman, J.A. 1972, *The Description of Societal Bilingualism*, California: Academic Press.
- Holmes, J. 1992. *An Introduction to Sociolinguistics*. London: Longman.
- Hymes, D. 1972. 'Models of Interaction of Language and Social Life'. Dalam John J. Gumperz and Dell Hymes.
- Kramsch, C. 2002b. *Language Acquisition and Language Socialization: Ecological Perspectives*. London and New York: Continuum.
- Mac Whinney, B. 1998. Models of the emergence of language. *Annual Review of Psychology* 49, 199-227. <http://psyling.psy.cmu.edu/papers/annual.pdf> (accessed 04.12.02).

- Mahmudah. 2005. "Sikap dan Pemilihan Bahasa Kelompok Sosial Menengah Masyarakat Kota Makassar Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia Ragam Baku". Pendekatan Gender. *Disertasi*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ratna. 2013. "Penggunaan Bahasa pada Pelayanan Publik di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros (Studi Sociolinguistik)". *Tesis*. Universitas Negeri Makassar.
- Taha, Z. 2008. *Gapura Bahasa. Kumpulan Makalah Pilihan Tentang Bahasa dan Pengajaran Bahasa*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 *tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2011.
- Wijaya, P. D. dan Mahmud Rohmadi. 2006: *Sosilinguistik: kajian Teori dan Anasis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.